

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, R. S. 2020. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendekia Press..
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basniwati, G. A. 2020. *Hukum Keimigrasian*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Bayu Dwi Anggono, 2022. *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chahyaningsih, A. S. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Christian, J. H. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Estiningsih, M. 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Fajlurrahman Jurdi, 2021. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Rangkang Education dan Republik Institute
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mauna, B. 2001. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia.

- Poernomo, dan Aan Efendi. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ridwan, HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadjijono. 2011. *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Santoso, I. 2012. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Indonesia*. Bandung: Pustaka Raka Cipta.
- Soetoprawiro, K. 1994. *kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suadi, A. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Sujamto. 1993. *Cakrawala Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sulaiman. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Supramono, g. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryana, M. D. 2020. *Pengawasan Keimigrasian Teknik Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. Depok: BPSDM KUMHAM Press.
- Ukun, W. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT Adi Kencana Aji.
- Wijayanti, H. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Wijayanti Herlin (dkk). 2022, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian (Perkembangan Isu-isu Terkini)*, Malang: UB Press.
- Yudha, B. 2003. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Bandung: Alumni.

Zeitung, S. 2012. *Migrasi Internasional di Asia dan Eroupa*. Jakarta: Ombak.

JURNAL

Amar Wahyudi, F.S. 2022. Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Perundang-undangan. *Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi*.

Asrul, M. 2017. Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, *Jurnal Perspektif Vol. 22, No. 1*.

I Gusti Putu Anom, dkk. 2022. Potret Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. *Journal Of Law and Border Protection Vol. 4 No. 1*.

Kaho, Y. R. 1987. Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing. *Jurnal Ilmu Politik, Vol. 2*.

Roisah, A. N. 2020. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay). *Jurnal Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia No. 2*.

Sa'adah, R. S. 2022. Analisis Peranan dan Strategi dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing. *Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 19, No. 2*.

Setiawan. 2013. Efektivitas Pengawasan Orang Asing pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. *Arena Hukum, Vol. 6, No. 2*.

Sudrajat, A. S. 2010. Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dhubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7, No. 3*.

KARYA TULIS ILMIAH

Muhammad Zulfan Hakim, 2017, Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, (<https://scholar.google.co.id/citations>) diakses tanggal 15 Maret 2023

Ristanti, N. D. 2021. Analisis Tindakan Administratif Keimigrasian Pada Kasus Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara India AN. Harjith

Singh Dhillon. *Karya Tulis Ilmiah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.*

SKRIPSI

Herlina. 2019. Pengawasan lapangan Terhadap Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di Kota Makassar. *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.*

Nurhayati, S. 2012. Metodeologi Penelitian Praktis. *Skripsi, Fakultas Ekonomi Unlversitas Pekalongan.*

Rinanda, D. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing yang Melanggar Izin Tinggal Imigrasi Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia. *Skripsi Universitas Muhammadiyah.*

TESIS

Anwar, K. 2011. Pemberian KITAS Bagi Orang Asing Disponsori Istri ditinjau dari Perspektif Hukum Keimigrasian. *Thesis Universitas Brawijaya Malang.*

Safaat, N. 2008. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana. *Thesis universitas Indonesia.*

ARTIKEL/BERITA

<https://makassar.imigrasi.go.id/pendeprotasian-salah-seorang-wn-malaysia-yang-kedapatan-melanggar-izin-tinggal-di-indonesia/> diakses pada tanggal 10 Januari 2023

<https://www.tagar.id/langgar-izin-tinggal-wna-tiongkok-dideportasi/> diakses pada tanggal 10 Januari 2023

<https://makassar.imigrasi.go.id/imigrasi-makassar-kembali-mendeportasi-1-warga-negara-asing-asal-yaman/> diakses pada tanggal 10 Januari 2023

<https://m.merdeka.com/peristiwa/ditangkap-imigrasi-karena-langgar-izin-tinggal-wn-yaman-akui-buang-paspor.html/> diakses pada tanggal 10 Januari 2023

<https://makassar.tribunnews.com/2023/01/10/overstay-wna-polandia-diamankan-imigrasi-makassar/> diakses pada tanggal 12 Januari 2023

Wilayah kerja kantor imigrasi kelas I TPI Makassar
<https://makassar.imigrasi.go.id/profile/wilayah-kerja/> diakses pada tanggal 6 Juni 2023

Profil kantor Imigrasi kelas I TPI Makassar
<https://makassar.imigrasi.go.id/profil-kantor-imigrasi-kelas-i-makassar/> diakses pada tanggal 6 Juni 2023

Pelabuhan Khusus Biringkassi-Semen Tonasa Pangkep Ditetapkan Jadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6208-pelabuhan-khusus-biringkassi-semen-tonasa-pangkep-ditetapkan-jadi-tempat-pemeriksaan-imigrasi/> diakses pada tanggal 7 Juni 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Preseiden Nomor 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Intelijen Keimigrasian.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR
Jalan Perintis Kemerdekaan KM.13 Makassar
Telepon. 0411-584559 Faksimile. 0411-584906
Laman: makassar.imigrasi.go.id, Surel: kanim.makassar@imigrasi.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W.23.IMI.IMI.1-UM.01.01- 2071

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masniati, S.H., M.H.
NIP : 197312171994032001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Menerangkan dengan sesungguhnya :

NO	NAMA	JURUSAN	ASAL SEKOLAH
1	Rezky Amalia AK	Hukum Administrasi Negara	U N H A S




Telah Melaksanakan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Ijin Tinggal di Kota Makassar"**. yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Mei 2023 s/d 11 Juni 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar .

Demikian untuk menjadi maklum.



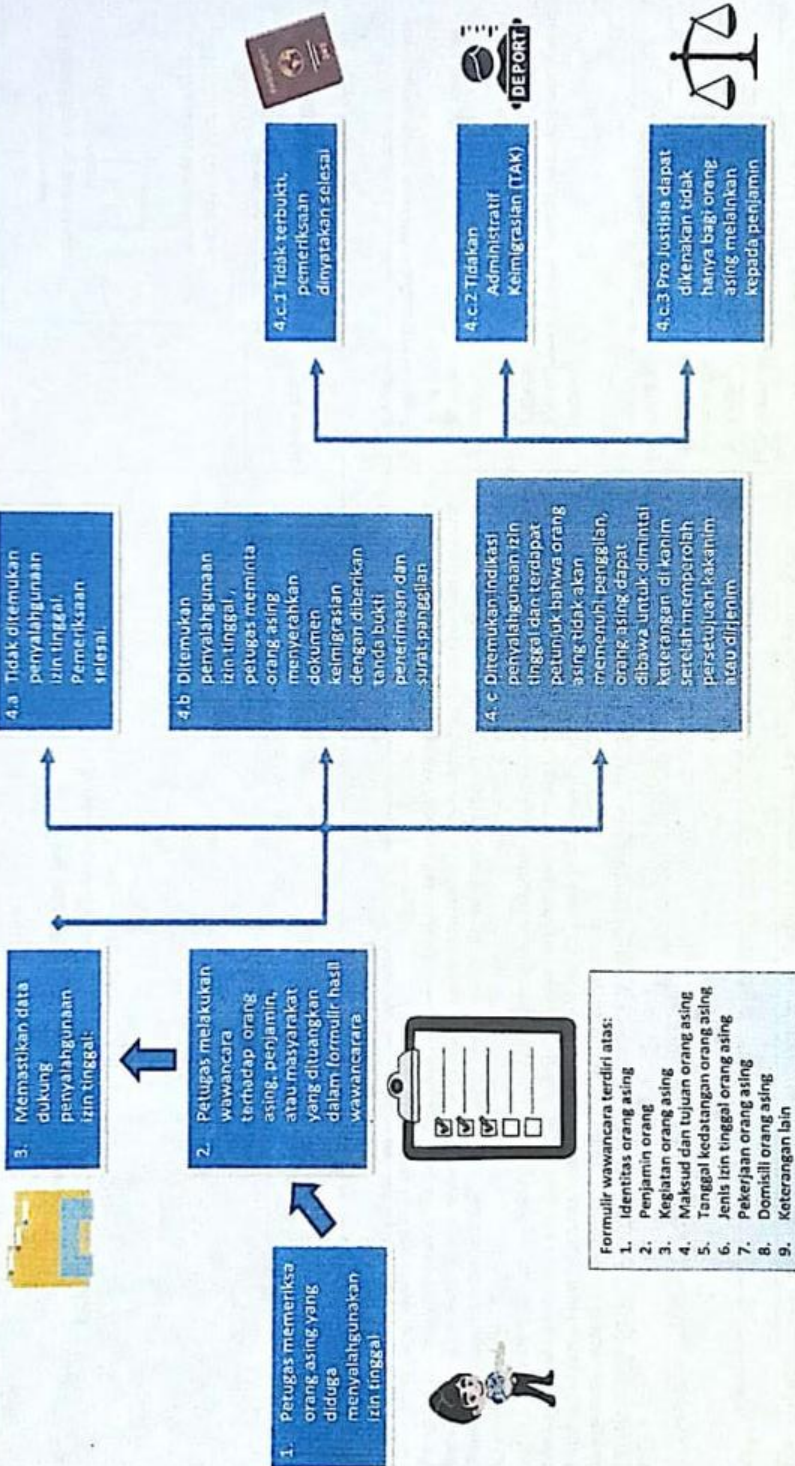
Makassar, 12 Juni 2023
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Masniati
NIP 197312171994032001

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR		NOMOR SOP : W.23.JMI.MI.1-GR. 0188
		TGL PEMBUATAN : 01 FEBRUARI 2019
		TGL PELAKSANAAN : 08 APRIL 2019
		Mengsahkan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar  Paliawarukka, S.H., M.H. NIP. 196601191991031001
		
		NAMA SOP : PENANGANAN ORANG ASING YANG DIDUGA MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DALAM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
KUALIFIKASI PELAKSANA		
DASAR HUKUM: <ol style="list-style-type: none"> Undang – Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.6 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan melakukan penanganan orang asing; Mengetahui prosedur penanganan orang asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan; Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none"> SOP PENGAWASAN KEIMIGRASIAN 		PERALATAN <ol style="list-style-type: none"> Komputer/printer/scanner Jaringan intranet dan aplikasi nyiddakim Kamera/mesin pindai biometric
PERINGATAN Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan		PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan sebagai data elektronik dan manual



SOP PENANGANAN ORANG ASING YANG DIDUGA MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DALAM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.13 DAYA -
 Telp.(0411) 584559 ; Fax (0411) 584906
 Email :kanim_makassar@imigrasi.go.id Website : <https://makassar.imigrasi.go.id/>

LAPORAN KASUS TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

NO	NAAMA	JENIS KELAMIN	KEWARGANEGARAAN	KANTOR IMIGRASI	TANGGAL LK	STATUS TAHAPAN	TAK
1		LAKI - LAKI	CHINA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	02-07-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
2		LAKI - LAKI	CHINA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	02-07-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
3		LAKI - LAKI	CHINA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	02-07-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
4		LAKI - LAKI	CHINA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	05-07-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
5		LAKI - LAKI	TAIWAN	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	23-07-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
6		LAKI - LAKI	PAPUA NUGINI	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	23-08-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
7		LAKI - LAKI	BANGLADESH	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	03-09-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
8		LAKI - LAKI	KOREA SELATAN	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	26-11-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
9		PEREMPUAN	KOREA SELATAN	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	26-11-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
10		PEREMPUAN	FILIPINA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	26-11-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
11		LAKI - LAKI	PERANCIS	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	16-12-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
12		LAKI - LAKI	SPANYOL	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	16-12-2019	KEPUTUSAN	DEPORTASI
13		LAKI - LAKI	MALAYSIA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	18-02-2020	KEPUTUSAN	DEPORTASI
14		PEREMPUAN	MALAYSIA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	04-03-2020	KEPUTUSAN	DEPORTASI
15		PEREMPUAN	CHINA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	23-03-2020	KEPUTUSAN	DEPORTASI
16		LAKI - LAKI	RUMANIA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	05-06-2020	KEPUTUSAN	DEPORTASI
17		LAKI - LAKI	RUMANIA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	05-06-2020	KEPUTUSAN	DEPORTASI
18		LAKI - LAKI	CHINA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	30-07-2020	KEPUTUSAN	DEPORTASI
19		PEREMPUAN	CHINA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	30-07-2020	KEPUTUSAN	DEPORTASI
20		PEREMPUAN	CHINA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	30-07-2020	KEPUTUSAN	DEPORTASI
21		PEREMPUAN	CHINA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	24-09-2020	KEPUTUSAN	PROJUSTICIA, DEPORTASI
22		LAKI - LAKI	AUSTRALIA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	19-03-2021	KEPUTUSAN	DEPORTASI
23		PEREMPUAN	FILIPINA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	11-06-2021	KEPUTUSAN	DEPORTASI
24		LAKI - LAKI	SINGAPURA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	31-08-2021	KEPUTUSAN	DEPORTASI
25		PEREMPUAN		KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	16-11-2021	KEPUTUSAN	DEPORTASI
26		LAKI - LAKI	YAMAN	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	31-08-2022	KEPUTUSAN	PROJUSTICIA, DEPORTASI
27		LAKI - LAKI	POLANDIA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	16-01-2023	KEPUTUSAN	DEPORTASI
28		LAKI - LAKI	POLANDIA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	17-01-2023	KEPUTUSAN	DEPORTASI
29		LAKI - LAKI	VIETNAM	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	20-02-2023	KEPUTUSAN	DEPORTASI
30		PEREMPUAN	THAILAND	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	24-02-2023	KEPUTUSAN	DEPORTASI
31		LAKI - LAKI	JERMAN	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	14-03-2023	KEPUTUSAN	DEPORTASI
32		LAKI - LAKI	ETHIOPIA	KANTOR IMIGRASI KLAS I MAKASAR	24/05/2023	KEPUTUSAN	DEPORTASI



DATA PENETAPAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR
PERIODE BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2018

NO	KEWARGANEGARAAN	NO.PASPOR	IZIN TINGGAL	INDEKS	ALASAN	PASAL				
							(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)				
1	MALAYSIA		ITAS	C316	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
2	CHINA		VOA	B213	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
3	TIMOR LESTE		IK	B211A	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
4	ARGENTINA		—	—	ILLEGAL ENTRY DAN ILLEGAL STAY	PASAL 119 AYAT (1) Jo PASAL 113 UU NO 6 TAHUN 2011				
5	ARGENTINA		—	—	ILLEGAL ENTRY DAN ILLEGAL STAY	PASAL 119 AYAT (1) Jo PASAL 113 UU NO 6 TAHUN 2011				
6	TURKI		BVKS	—	TINDAK PIDANA PENCURIAN	PASAL 363 KUHP				
7	TURKI		BVKS	—	TINDAK PIDANA PENCURIAN	PASAL 363 KUHP				
8	AMERIKA SERIKAT		IK	B211A	PENYALAHGUNAA N IJIN TINGGAL	PASAL 122 HURUF (a) UU NO 6 TAHUN 2011				
9	JERMAN		ITAS	B312	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
10	PERANCIS		VOA	B213	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
11	PERANCIS		VOA	B213	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
12	MALAYSIA		BVKS	—	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
13	MALAYSIA		BVKS	—	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
14	MALAYSIA		BVKS	—	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
15	MALAYSIA		BVKS	—	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
16	AUSTRALIA		VOA	—	KEWARGANEGARAAN GANDA	Pasal 23 UU No 12 Tahun 2006				
17	MESIR		VOA	—	PENYALAHGUNAA N IJIN TINGGAL	PASAL 122 HURUF (a) UU NO 6 TAHUN 2011				
18	AFRIKA SELATAN		VOA	—	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
19	BRAZIL		VOA	—	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
20	PAKISTAN		IK	B211A	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011				
21	AUSTRALIA		BVKS	—	PENYALAHGUNAA N IJIN TINGGAL	PASAL 122 HURUF (a) UU NO 6 TAHUN 2011				
22	TURKI		BVKS	—	PENYALAHGUNAA N IJIN TINGGAL	PASAL 122 HURUF (a) UU NO 6 TAHUN 2011				
23	TURKI		BVKS	—	PENYALAHGUNAA N IJIN TINGGAL	PASAL 122 HURUF (a) UU NO 6 TAHUN 2011				

24	TURKI		BVKS	—	PENYALAHGUNAA N IJIN TINGGAL	PASAL 122 HURUF (a) UU NO 6 TAHUN							
25	TURKI		BVKS	—	PENYALAHGUNAA N IJIN TINGGAL	PASAL 122 HURUF (a) UU NO 6 TAHUN		*					
26	AUSTRALIA		ITAS	B312	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011							
27	AUSTRALIA		ITAS	B312	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011							
28	KOREA SELATAN		IK	B211A	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011							
29	AUSTRALIA		VOA	—	KEWARGANEGAR AAN GANDA	Pasal 23 UU No 12 Tahun 2006							
30	MESIR		VOA	—	PENYALAHGUNAA N IJIN TINGGAL	PASAL 122 HURUF (a) UU NO 6 TAHUN 2011							
31	AFRIKA SELATAN		VOA	—	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011							
32	BRAZIL		VOA	—	OVERSTAY	PASAL 78 AYAT (1) UU NO 6 TAHUN 2011							